

BAB II

GAMBARAN UMUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

2.1 Profil Partai Solidaritas Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia atau PSI merupakan partai politik yang memiliki DNA⁴⁸ perjuangan anti-korupsi dan anti-intoleransi. PSI didirikan pada tanggal 16 November 2014 di Jakarta. PSI lahir dengan semangat muda untuk membawa gagasan dan cara berpolitik baru. Kebaruan ini diwujudkan dengan beberapa hal, yang pertama adalah partai baru yang dikelola oleh pengurus baru, dimana syarat rekrutmennya adalah tidak pernah secara aktif menjadi pengurus harian di partai politik lain; yang kedua adalah partai baru yang dikelola anak muda, dimana syarat untuk menjadi pengurus adalah berusia dibawah 45 tahun; yang ketiga adalah partai baru yang terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang seperti suku, ras, atau agama; yang keempat adalah partai baru yang ramah perempuan dan anak, dimana keputusan-keputusan politik PSI diorientasikan untuk meningkatkan standar kehidupan sosial dan politik bagi anak-anak dan perempuan; dan yang kelima adalah partai baru yang modern dimana PSI menganut prinsip-prinsip kemanusiaan modern, termasuk memperjuangkan

⁴⁸ DNA (deoxyribonucleic acid) dalam biologi merupakan penyimpan informasi genetik dan juga merupakan substansi gen yang menjadi unit pewarisan sifat yang membawa informasi dari induk pada keturunannya. Hal ini membuat DNA menjadi suatu ciri khas yang membedakan setiap makhluk hidup. Menunjuk pada hal tersebut, DNA dalam politik di artikan sebagai ciri berpolitik seseorang atau sekelompok orang yang membedakan cara berpolitik seseorang / sekelompok orang tersebut dengan orang lain.

demokrasi dan melindungi hak asasi manusia (HAM), mempercayai ilmu pengetahuan sebagai landasan pengambilan kebijakan, serta menggunakan teknologi informasi dalam kampanye publik dan juga manajemen internal partai.⁴⁹ Sebagai partai anak muda, PSI merupakan salah satu pembuktian bahwa anak muda bukanlah generasi yang apolitis.

Seperti halnya partai politik yang lain, PSI memiliki visi dan misi sebagai tujuan dari perjuangan mereka. Berikut merupakan visi dan misi PSI sesuai dengan yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PSI.

Visi PSI adalah “Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat.”⁵⁰

Dan misi PSI adalah:⁵¹

1. Menggalang kekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan politik yang ideologis, terorganisir dan terstruktur.
2. Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi.
4. Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis, partisipatif dan beradab.

⁴⁹ PSI, *ABCD Partai Solidaritas Indonesia*, Jakarta, 2015, hlm. 5-7

⁵⁰ PSI, *Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga PSI*, 2015 pasal 4

⁵¹ *Ibid*, pasal 5

5. Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip Demokrasi Ekonomi.
6. Menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum.
7. Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia.
8. Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial-budaya yang egaliter berdasarkan prinsip bhineka tunggal ika.
9. Memberikan makna baru pada demokrasi substantif yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
10. Memberikan pendidikan politik, kewarganegaraan dan kebangsaan kepada seluruh rakyat Indonesia.

PSI terbentuk karena menyadari bahwa politik adalah tanggung jawab yang mulia untuk mencapai kebahagiaan bagi seluruh masyarakat.⁵² Karena melalui partai politik, berbagai macam kebijakan yang menentukan nasib masyarakat akan dilahirkan. Sebagai partai yang menyatakan diri mempunyai DNA anti korupsi dan anti intoleransi, PSI sangat ingin melahirkan pejabat publik yang keseluruhan pikiran dan tindakannya dijalankan atas dasar kepentingan yang lebih besar bagi negara dan bangsa Indonesia, tidak hanya berdasar kepentingan pribadi politik jangka pendek.⁵³

PSI juga merupakan partai yang memisahkan antara administrasi partai dan pelayanan politik. Pengelolaan administrasi partai akan

⁵² PSI Tangerang Selatan. *Apa itu PSI*. diakses melalui <https://tangselpsi.id/>

⁵³ PSI, *ABCD Partai Solidaritas Indonesia*, Jakarta, 2015, hlm. 4

dilakukan oleh tenaga muda profesional, sehingga politisi PSI yang sudah menjabat sebagai pejabat publik tidak akan disibukkan mengurus partai, namun fokus untuk melayani rakyat.

PSI memiliki 9 prinsip dasar organisasi yang mana diharapkan prinsip ini akan membantu keberjalanan partai dan membuat partai mendapatkan dukungan yang besar. Kesembilan prinsip tersebut adalah:⁵⁴

1. Partai Modern: terbuka, demokratis, terpimpin, berbasis platform, berbudaya partisipasi, berkemajuan.

Terbuka – PSI terbuka bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial, suku, agama, ras, keyakinan, etnis, atau gender. Partai ini berpegang teguh pada prinsip inklusif dan tidak sektarian.

Demokratis – PSI menghormati prinsip demokrasi dalam menjalankan organisasinya.

Terpimpin – dalam struktur organisasinya, PSI mengadopsi sistem organisasi terpimpin dimana kepemimpinan politik dipegang oleh dewan pembina DPP sedangkan kepemimpinan eksekutif dan administratif dipegang oleh DPP.

Berbasis platform – salah satu strategi paling efektif untuk mewujudkan kondisi partai massa yang sebenarnya adalah melalui proses pengembangan program dasar secara demokratis.

Penting untuk melibatkan semua anggota dalam proses

⁵⁴*Ibid*, hlm. 11-22

pengembangan program dasar tersebut sehingga mereka merasa memiliki dan terlibat aktif.

Berbudaya partisipatis – untuk menjalankan tugasnya dan mempertahankan legitimasinya sebagai partai demokratis, PSI dengan serius mengembangkan budaya partisipatif dalam demokrasi internal partainya.

Berkemajuan – sebagai partai modern, partai harus dapat menjawab perkembangan jaman, bergerak dinamis, dan bergerak kedepan sesuai kebutuhan negara dan rakyat.

2. Kemajemukan / Pluralisme

Indonesia sebagai negara yang majemuk, merupakan sebuah mozaik yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. PSI menyadari bahwa prinsip Bhineka Tunggal Ika menjadi dasar dari setiap program dan gerakannya. Oleh karena itu PSI mewajibkan kadernya untuk menjunjung tinggi kemajemukan / pluralisme.

3. Demokrasi Substantif / Demokrasi Sosial

Demokrasi substantif adalah pengakuan atas lima kategori Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak sipil, hak politik, hak sosial, hak ekonomi, dan hak kebudayaan. Demokrasi Substantif juga menolak jika politik dilihat hanya sebagai sirkulasi kekuasaan periodik. PSI meyakini bahwa politik seharusnya memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu meningkatkan kualitas

hidup warga negara, bukan hanya terfokus pada pergantian elit semata.

4. Demokrasi Ekonomi

Dalam UUD 1945, secara eksplisit terkandung gagasan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, yang berarti rakyat adalah pemegang kuasa tertinggi dalam bidang politik maupun ekonomi di negara kita. PSI memiliki pendirian dalam mendukung prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Prinsip ini menegaskan pentingnya menjalankan perekonomian nasional dengan dasar yang jelas dalam kerangka demokrasi ekonomi. PSI berkomitmen untuk mempromosikan dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi tersebut guna mencapai keadilan, partisipasi, dan kesejahteraan ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Bagi PSI, kesetaraan gender berarti menciptakan kondisi bagi pria maupun wanita untuk memiliki kesempatan yang sama dan hak-hak yang sama sebagai manusia. Hal ini bertujuan agar keduanya dapat berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan nasional. Kesetaraan gender juga melibatkan upaya penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural,

baik terhadap pria maupun wanita. Bagi PSI, keadilan gender merupakan proses dan perlakuan adil terhadap pria dan wanita. Keberhasilan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi. Dengan demikian, baik pria maupun wanita akan memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, serta memperoleh manfaat yang setara dan adil.

6. Negara Kesejahteraan

Negara Kesejahteraan bukan sekedar pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*sosial service*). Namun juga mencakup sebuah sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan sosial. PSI menginginkan negara yang hadir, bukan negara yang menyerahkan nasib warganya sepenuhnya kepada sektor swasta. Beberapa sektor yang langsung mempengaruhi kehidupan rakyat seperti kesehatan, pendidikan, pengelolaan air dan listrik haruslah menjadi tanggung jawab negara.

7. Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak mereka dilahirkan hingga meninggal dunia. Hak-hak ini dianggap sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia. PSI memiliki pendirian bahwa hak asasi ini harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara,

hukum, dan pemerintah. Seluruh kader PSI wajib menunjukkan penghormatan terhadap HAM, karena hak-hak ini merupakan hak yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat dikurangi atau dihapuskan oleh siapapun dalam keadaan apapun.

8. Penghormatan Ekologis

Manusia dan alam tidaklah bisa dipisahkan. Tindakan yang manusia lakukan akan memberikan pengaruh pada lingkungan demikian juga dengan proses alam yang terjadi di lingkungan secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan manusia. PSI menetapkan prinsip-prinsip yang mendukung pelestarian lingkungan berupa: (1) Sikap hormat terhadap alam (*Respect for Nature*). (2) Prinsip Tanggung jawab terhadap alam (*Moral Responsibility for Nature*). (3) Solidaritas kosmis (*Cosmic Solidarity*). (4) Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam (*Caring for Nature*). (5) Prinsip “*No Harm*” yang artinya: manusia tidak akan mau merusak alam secara tidak perlu. (6) Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. (7) Prinsip Keadilan, dimana manusia harus berperilaku satu terhadap yang lain dalam kaitan dengan alam semesta dan bagaimana sistem sosial harus diatur supaya berdampak positif pada kelestarian lingkungan hidup. (8) Prinsip integritas moral.

9. Keadilan Sosial

Sila kelima Pancasila secara jelas telah menyebutkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan fondasi yang harus dibangun dalam kehidupan berkomunitas. Soekarno pernah menyatakan bahwa keadilan sosial mengacu pada masyarakat yang adil dan makmur, di mana setiap individu merasa bahagia dan terhormat, tanpa adanya penindasan atau eksploitasi.

2.2 Arti Logo Partai Solidaritas Indonesia

Logo yang dimiliki Partai Solidaritas Indonesia terinspirasi dari perkataan Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno “Bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya. Dengan sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya.” Kalimat tersebut dikatakan oleh Soekarno saat pidatonya di Semarang pada tanggal 29 Juli 1959.

Gambar 2.1
Logo Partai Solidaritas Indonesia



Sumber: psi.id

Logo PSI terdiri dari beberapa elemen, yaitu sebuah segi empat berwarna merah dengan gambar kepalan tangan yang menggenggam bunga mawar berwarna putih, bertuliskan PSI dengan huruf P yang terbuka. Arti dari lambang dalam logo tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Warna merah menjadi lambang keberanian, warna putih menjadi lambang kesucian dan kejujuran, warna hitam menjadi lambang kesetiaan dan solidaritas.
2. Tulisan PSI dengan huruf P yang terbuka melambangkan Partai Solidaritas Indonesia adalah partai yang inklusif bagi semua kalangan dan golongan.
3. Bunga mawar berwarna putih melambangkan solidaritas internasional dengan gagasan demokratis substantif yang juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.
4. Lima kelopak mawar dibagian luar menjadi lambang Pancasila, tiga kelopak mawar bagian dalam melambangkan Trisakti.
5. Kepalan tangan berwarna putih menjadi lambang tekad suci, optimis, pantang menyerah, serta kuat dalam memegang prinsip dan cita-cita bangsa.
6. Latar belakang dengan warna merah melambangkan bahwa PSI selalu tampil dengan keberanian dalam setiap aksinya dalam ranah politik, tanpa merasa takut pada siapapun yang mencoba menghalangi cita-cita bangsa Indonesia.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 10-11

2.3 Struktur Organisasi Partai Solidaritas Indonesia

Struktur organisasi Partai Solidaritas Indonesia terdiri dari organisasi ditingkat pusat yang disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP); organisasi ditingkat provinsi yang disebut Dewan Pimpinan Wilayah (DPW); organisasi ditingkat kabupaten / kota yang disebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD); organisasi ditingkat kecamatan yang disebut Dewan Pimpinan Cabang (DPC); organisasi ditingkat desa / kelurahan yang disebut Dewan Pimpinan Ranting (DPRt); dan juga perwakilan partai di luar negeri yang disebut Perwakilan Luar Negeri Partai Solidaritas Indonesia. Dalam struktur organisasinya, PSI menganut sistem organisasi dipimpin dengan kepemimpinan politik tertinggi berada dibawah Dewan Pembina DPP, sementara untuk kepemimpinan eksekutif dan administratif tertinggi partai berada dibawah DPP.⁵⁶

Selain sebagai partai anak muda, PSI juga merupakan partai politik yang ramah anak dan perempuan. Dalam struktur organisasinya, PSI memberikan porsi yang besar untuk perempuan menjadi pengurus partai. Dalam Undang-Undang Pemilu, pemerintah mewajibkan kepengurusan perempuan di DPP berjumlah minimal 30%, namun di PSI, terdapat aturan mengenai jumlah minimal pengurus perempuan disemua tingkat mulai dari DPP hingga DPRt sebesar 30%.⁵⁷ Bahkan, di DPP PSI sendiri jumlah pengurus perempuan mencapai 60% dari keseluruhan pengurus. Di tahun 2019, pengurus di DPP PSI terdiri dari 15 orang yang terdiri dari:

⁵⁶ *Ibid, hlm. 12*

⁵⁷ Anggaran Dasar PSI pasal 26

Ketua Dewan Pembina	: Jeffrie Geovanie
Sekretaris Dewan Pembina	: Sunny Tanuwidjaja
Ketua Mahkamah Partai	: Albert Aries
Sekretaris Mahkamah Partai	: Fenty Noverita Indrawaty
Anggota Mahkamah Partai	: Fenty Retnofati Senjaya
Anggota Mahkamah Partai	: Gatot Goei
Ketua Umum	: Grace Natalie Louisa
Ketua 1	: Sumardy
Ketua 2	: Tsamara Amany Alatas
Ketua 3	: Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka
Sekretaris Jendral	: Raja Juli Antoni
Wakil Sekretaris Jendral	: Danik Eka Rahmaningtyas
Wakil Sekretaris Jendral	: Satia Candra Wiguna,
Bendahara Umum	: Suci Mayang Sari
Wakil Bendahara Umum	: Lila Zuhara

Secara keseluruhan, struktur kepengurusan di Partai Solidaritas Indonesia baik dari tingkat DPP hingga DPRt dapat dikatakan ramping apabila dibandingkan dengan partai-partai lain yang rata-rata memiliki jumlah pengurus di tingkat DPP diatas 30 orang bahkan ada yang ratusan.⁵⁸ Dalam ADART PSI diatur jumlah pengurus dengan tujuan untuk efektifitas dan efisiensi dimana di tingkat DPW terdapat 7 orang pengurus yang terdiri dari Ketua, 2 Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris,

⁵⁸ Berdasarkan data KPU yang diakses melalui <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/skparpol>

Bandahara, dan Wakil Bandahara. Di tingkat DPD terdapat 5 orang pengurus yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Bandahara. Sedang di tingkat DPC dan DPRt, terdapat 3 orang pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bandahara.

2.4 Profil Hasil Pemilihan Umum

Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019, PSI mendaftarkan sebanyak 575 bakal caleg DPR RI yang terdiri dari 265 perempuan atau setara 46.1% dan 310 Laki-Laki untuk 80 daerah pemilihan.⁵⁹ Berdasarkan keputusan KPU RI Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR Pemilu 2019, tertanggal 20 September 2018, 574 bakal caleg PSI lolos menjadi caleg DPR RI.

Dari hasil rekapitulasi suara dari Pemilu Legislatif, PSI memperoleh suara sebesar 1.89%, PSI tidak mampu menyentuh angka *Parlementary Threshold* sebesar 4% dan gagal untuk masuk kedalam parlemen nasional. Apabila dilihat secara lebih rinci dari hasil rekapitulasi suara, PSI memperoleh suara tinggi di kota-kota besar di Indonesia. Lima dapil dengan perolehan suara tertinggi PSI berada di dapil DKI III (Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Utara) dengan 245.667 suara, kemudian dapil DKI II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Luar Negeri) dengan 232.268 suara, kemudian Banten III (Kota Tangerang, Kabupaten

⁵⁹ KPU, *Tahap Pengajuan Pemilu 2019 Calon Anggota DPR RI*, diakses melalui <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/pengajuan-calon>

Tangerang, Tangerang Selatan) dengan 130.000 suara, kemudian Jawa Timur I (Sidoarjo, Kota Surabaya) dengan 109.130, dan DKI I (Jakarta Timur) dengan 105.136 suara.⁶⁰

⁶⁰ KPU, *Rekapitulasi Hasil Pemilu Legislatif DPR RI 2019*, diakses melalui <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprri/rekapitulasi/>